

APAKAH PERTUMBUHAN UPAH MENYEBABKAN INFLASI ATAUKAH SEBALIKNYA?

Maria Indriyani Hewe Tiwu

Universitas Nusa Cendana
indrianitiwu@staf.undana.ac.id

Yohana Febiani Angi

Universitas Nusa Cendana
yfangi@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan klasik yang dihadapi banyak negara, khususnya negara berkembang, adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus, sementara pendapatan atau upah yang diterima oleh tenaga kerja tidak meningkat sesuai dengan kenaikan harga. Hal ini kemudian memberikan dampak pada daya beli tenaga kerja. Inflasi, yang ditandai dengan kenaikan harga barang dan jasa, berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, sehingga kemampuan mereka untuk membeli barang dan jasa kebutuhan sehari-hari menjadi menurun. Inflasi yang tinggi dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi, termasuk daya saing ekspor dan tabungan domestik. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah sering kali menaikkan upah minimum (UMR) setiap tahunnya guna menjaga daya beli masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara inflasi dan pertumbuhan upah minimum di Indonesia. Berdasarkan data sekunder berupa data tahunan pada periode 1997-2024, penelitian ini menggunakan uji kausalitas Granger untuk menguji hubungan antara kedua variabel. Hasil analisis menunjukkan bahwa inflasi mempengaruhi pertumbuhan upah minimum, sementara pertumbuhan upah minimum tidak mempengaruhi inflasi. Dengan demikian, kenaikan upah minimum di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang terjadi, bukan sebaliknya. Penyesuaian upah minimum bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga barang dan jasa..

Kata kunci : Inflasi, Upah Minimum, Kausalitas Granger, Daya Beli, Ekonomi Indonesia..

ABSTRACT

A classic problem faced by many countries, especially developing countries, is the continuous increase in prices of goods and services, while the income or wages received cannot meet household living needs. Inflation, which is characterized by an increase in the prices of goods and services, affects people's purchasing power, so that their ability to buy goods and services for daily needs decreases. High inflation can disrupt economic stability, including export competitiveness and domestic savings. To overcome this, the government often increases the minimum wage (UMR) every year to maintain people's purchasing power. This research aims to analyze the relationship between inflation and minimum wage growth in Indonesia. Based on secondary data in the form of annual data for the period 1997-2024, this research uses the Granger causality test to test the relationship between the two variables. The analysis results show that inflation affects minimum wage growth, while minimum wage growth does not affect inflation. Thus, the increase in the minimum wage in Indonesia is more influenced by the level of inflation that occurs, not vice versa. The minimum wage adjustment aims to maintain people's purchasing power in the face of rising prices of goods and services.

Keywords : Inflation, Minimum Wage, Granger-Causality, Purchasing-Power, Indonesian Economy.

PENDAHULUAN

Permasalahan klasik yang sering dihadapi oleh negara-negara di dunia khususnya negara berkembang adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus menerus namun tingkat pendapatan atau upah yang diperoleh tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga. Upah yang diperoleh oleh tenaga kerja sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan digunakan untuk membeli barang dan jasa oleh karena itu semakin tinggi upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah maka pembelian atau permintaan terhadap barang dan jasa akan semakin tinggi. Upah minimum adalah imbalan atas pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk perusahaan. Kenaikan upah minimum ditunjukkan dengan peningkatan jumlah permintaan barang dan jasa, oleh karena itu peningkatan jumlah permintaan barang dan jasa dapat menyebabkan jumlah produksi meningkat, selain itu juga dapat menyebabkan peningkatan pendapatan. Sedangkan berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2018), upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jarring pengaman. Besaran jumlah upah minimum suatu daerah ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) disuatu daerah dengan memperhatikan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi, sehingga upah minimum antar daerah berbeda-beda. Kenaikan upah memang dapat meningkatkan kesempatan kerja, karena dengan naiknya tingkat upah diharapkan juga terjadi peningkatan kesempatan kerja melalui peningkatan konsumsi (Rakhmawati & Boedirochminarni, 2018)

Inflasi adalah kecenderungan harga barang naik secara terus menerus. Kenaikan harga barang bersifat menyeluruh, jika hanya beberapa jenis barang saja maka tidak dikatakan inflasi kecuali jika kenaikan harga satu barang

meluas dan berimbas pada kenaikan barang-barang lainnya. Inflasi yang tinggi menyebabkan menurunnya pendapatan riil masyarakat yang selama ini memiliki pendapatan tetap, juga dapat mengurangi nilai kekayaan masyarakat seperti uang simpanan di bank dan uang tunai yang dimiliki (Sukirno, 2013). Pada satu sisi inflasi dapat disebabkan oleh kurangnya produksi dan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap suatu barang. Sementara itu pada sisi lain, inflasi dapat juga disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi dalam suatu perusahaan, yang akan mengakibatkan meningkatnya harga hasil produksi. Menurut (M Nopirin, 2013) *Cost Push Inflation* pada dasarnya ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi. Jadi, inflasi yang dibarengi dengan resesi. *Cost Push Inflation* timbul dimulai dengan adanya penurunan dalam penawaran total (aggregate supply) sebagai akibat kenaikan biaya produksi.

Tingginya permintaan akan barang dan jasa akan mendorong bertambahnya jumlah barang dan jasa yang diproduksi sehingga meningkatkan biaya produksi dan pada akhirnya akan mendorong terjadinya kenaikan harga-harga barang secara umum. Kenaikan barang dan jasa secara terus menerus dari waktu ke waktu disebut sebagai inflasi.

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan dari waktu ke waktu, yang tinggi akan menjadi beban oleh banyak pihak. Dengan inflasi, maka daya beli suatu mata uang menjadi lebih rendah atau menurun. Dengan menurunnya daya beli mata uang, maka kemampuan masyarakat berpendapatan tetap dalam membeli barang dan jasa kebutuhan sehari-hari akan menjadi semakin rendah. Laju inflasi yang tidak stabil juga menyulitkan perencanaan bagi dunia usaha, tidak mendorong masyarakat untuk menabung, dan berbagai dampak negatif lain yang tidak kondusif bagi perekonomian secara keseluruhan (Suseno, 2009).

Berbagai kebijakan moneter dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan inflasi untuk mengurangi dampak yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Pertama, inflasi domestik yang tinggi menyebabkan tingkat balas jasa riil terhadap aset finansial domestik menjadi rendah (bahkan seringkali negatif), sehingga dapat mengganggu mobilisasi dana domestik dan bahkan dapat mengurangi tabungan domestik yang menjadi sumber dana investasi. Kedua, inflasi dapat menyebabkan daya saing barang ekspor berkurang dan dapat menimbulkan defisit dalam transaksi berjalan dan sekaligus dapat meningkatkan utang luar negeri. Ketiga, inflasi dapat memperburuk distribusi pendapatan dengan terjadinya transfer sumber daya dari konsumen dan golongan berpenghasilan tetap kepada produsen. Keempat, inflasi yang tinggi dapat mendorong terjadinya pelarian modal ke luar negeri. Kelima, inflasi yang tinggi akan dapat menyebabkan kenaikan tingkat bunga nominal yang dapat mengganggu tingkat investasi yang dibutuhkan untuk memacu tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu (Hera Susanti dkk, 1995).

Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk sebesar 283.488 juta jiwa dengan jumlah angkatan kerja sebesar 152,11 juta pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024) memberikan tekanan pada penyerapan tenaga kerja di setiap sektor lapangan pekerjaan, baik sektor informal maupun sektor formal. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2024 sebanyak 144,64 juta orang, naik sebanyak 4,79 juta orang dari Agustus 2023. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,31 juta orang. Pada Agustus 2024 sebanyak 60,81 juta orang (42,05 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik sebesar 1,16 persen poin dibanding Agustus 2023. Persentase setengah pengangguran pada Agustus 2024 naik sebesar 1,32 persen poin, sedangkan pekerja paruh waktu turun sebesar 0,46 persen poin dibanding Agustus

2023. Dan untuk mendukung dan menjaga daya beli masyarakat maka pemerintah Indonesia menaikkan Upah minimum setiap tahunnya. Sedangkan kondisi inflasi Indonesia pada Februari 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 2,75 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,58. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,36 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,90 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,57 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,13 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,95 persen; kelompok transportasi sebesar 1,40 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,68 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,55 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,38 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,09 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,13 persen (Badan Pusat Statistik, (2024).

Dorongan terjadinya inflasi berdasarkan kurva philip dapat disebabkan oleh terjadinya peningkatan permintaan tenaga kerja oleh sektor perusahaan baik sektor formal maupun informal. Dan kenaikan harga-harga barang dan jasa mendorong pemerintah Indonesia untuk menaikkan upah minimum setiap tahun untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis apakah kenaikan gaji setiap tahun mendorong terjadinya kenaikan harga-harga barang secara umum dan terus menerus ataukah inflasi yang mendorong dan mempengaruhi kenaikan upah minimum di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Inflasi

Secara umum, inflasi menurut Lipsey,etal.(1997)dinyatakan sebagai kenaikan rata-rata semua tingkat harga, dan terkadang kenaikannya terus-menerus dan berkepanjangan. Bila dilihat dari faktor penyebabnya, inflasi dapat dibedakan menjadi 1) cost-push inflation dan 2) demand-pull inflation. Pada prinsipnya inflasi yang pertama lebih disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi yang berdampak pada berkurangnya penawaran, ketika permintaan barang tetap maka akan mendorong kenaikan harga. Sementara itu, inflasi kedua disebabkan oleh meningkatnya permintaan, hukum demand mengatakan bila permintaan barang meningkat sementara penawarannya tetap akan mendorong harga meningkat.

Kenaikan harga barang adalah proses penyesuaian dari gejala terjadinya peningkatan permintaan. Begitu juga sebaliknya, dengan penurunan harga barang. Analogi tersebut dapat digunakan dalam analisis inflasi. Karena merupakan permintaan dan penawaran agregat, maka dapat dianggap merupakan permintaan dan penawaran perekonomian. Sehingga jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan pada kondisi keseimbangan atau PDB, karena inflasi adalah gejala di tingkat makro, maka permintaan dan penawaran yang dianalisis adalah bersifat agregat (Rahardja, 2015).

Upah Minimum

Boediono (1992) Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang digunakan dalam melaksanakan proses produksi. Dalam proses produksi tenaga kerja memperoleh pendapatan sebagai balas jasa dari usaha yang telah dilakukannya yakni upah. Maka pengertian permintaan tenaga kerja adalah tenaga kerja yang diminta oleh pengusaha pada berbagai

tingkat upah. Sedangkan menurut Simanjuntak (2001) menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan melakukan kegiatan lain seperti bersekolah atau mengurus rumah tangga dengan batasan umur 15 tahun.

Masalah penyerapan tenaga kerja juga erat kaitannya dengan kebijakan upah minimum. Upah merupakan salah satu biaya produksi yang harus dikeluarkan produsen sebagai balas jasa atas kegiatan produksi yang dilakukan tenaga kerja. Teori permintaan tenaga kerja menempatkan upah sebagai harga dari tenaga kerja. Permintaan dalam konteks ekonomi didefinisikan sebagai jumlah maksimum suatu barang atau jasa yang dikehendaki seorang pembeli untuk dibelinya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu (Sudarsono, 1990). Dalam hubungannya dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan. Teori upah subsistensi (hukum besi) oleh David Ricardo (1772-1823) upah ditentukan oleh interaksi penyediaan dan permintaan akan buruh. Lebih lanjut berasumsi bahwa bila pendapatan penduduk bertambah di atas tingkat subsisten, maka penduduk akan bertambah lebih cepat. Dari laju pertumbuhan makanan dan kebutuhan lain. Angkatan kerja bertambah akan bertambah pula memasuki pasar kerja dan mencari kerja. Penyediaan buruh menjadi lebih besar dari permintaan, akibatnya tingkat upah akan didorong untuk turun kembali ke tingkat subsistem. Kelemahan teori Ricardo tersebut, pertama, laju pertumbuhan penduduk tidak mutlak mempengaruhi penghasilan (upah) karena ada faktor sosial dan faktor sosiologis. Kedua, banyak negara dalam industri dan kesempatan kerja tumbuh lebih cepat dari laju pertumbuhan penduduk dan angkatan kerjanya, karena kemajuan teknologi dan peningkatan pendidikan serta perbaikan gizi termasuk

kesehatan secara terus menerus mendorong peningkatan produktivitas buruh. Tingkat upah dapat terus menerus ditingkatkan, bahkan banyak negara menunjukkan upah sudah diatas tingkat subsistem. Ketiga, kompetisi bisnis sekarang ini mendorong pengusaha meningkatkan produktivitas, yaitu memanfaatkan kemajuan teknologi meningkatkan kualitas buruhnya. Perbaikan upah merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas buruh, bila upah rendah pada tingkat subsistem akan mempertahankan produktivitas buruh rendah pula, maka termasuk pengusaha yang ketinggalan jaman (Felber Lube,2021). Menurut Keynes, inflasi terjadi karena ada sebagian masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Keadaan seperti ini ditunjukkan oleh permintaan masyarakat akan barang barang yang selalu melebihi jumlah barang barang yang tersedia

Penelitian yang dilakukan oleh Widiyanto dkk (2023) mengenai kausalitas upah minimum dan tingkat inflasi di Provinsi Jawa Tengah periode 2000 – 2020 menemukan bahwa tidak terdapat hubungan kasualitas dua arah antara upah minimum provinsi dengan tingkat inflasi Jawa Tengah tahun 2000 – 2020, jadi upah minimum provinsi tidak menyebabkan inflasi, sebaliknya inflasi juga tidak menyebabkan upah minimum provinsi.

Hipotesis

Berdasarkan kajian literatur dan penelitian terdahulu maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) H0 : Gaji tidak mempengaruhi INF
H1 : Gaji mempengaruhi INF
- b) H0 : INF tidak mempengaruhi Gaji
H2 : INF mempengaruhi Gaji

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data time series dan data variabel yang digunakan merupakan data tahunan pada rentang periode tahun 1997-2014 dengan objek penelitian di Negara Indonesia dengan mengelompokkan Indonesia menjadi wilayah Jawa dan wilayah Luar Jawa.

Penelitian ini menggunakan alat analisis Uji Kausalitas Granger untuk membuktikan bahwa apakah terdapat hubungan kausalitas atau hubungan saling memprediksi atau pengaruh antara dua variabel ekonomi. Dan dalam penelitian ini variabel ekonomi yang digunakan adalah variabel pertumbuhan Upah Minimum dan tingkat inflasi di Indonesia selama periode waktu 1997-2024. Hasil analisis dari uji Kausalitas Granger ini melihat pertanyaan yang muncul apakah variabel pertumbuhan upah minimum menyebabkan inflasi, atautkah sebaliknya yang mana jika variabel pertumbuhan upah minimum menyebabkan inflas artinya berapa banyak nilai pertumbuhan upah minimum pada periode sekarang dapat dijelaskan oleh nilai pertumbuhan upah minimum pada periode sebelumnya dan nilai tingkat inflasi pada periode sebelumnya (Ayu Wulansari,2015). Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Inflasi yang dilihat melalui indikator IHK, dan UMP dimana tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel tersebut. Menurut model dasar Granger yang telah disebutkan di atas maka diturunkan dalam estimasi model sebagai berikut :

$$Inf_i = \sum_{i=t}^p \beta_i Inf_{t-i} + \sum_{i=t}^r \delta_j W_{t-i} + \varepsilon_i$$

$$Wage_i = \sum_{i=t}^s \rho_i W_{t-i} + \sum_{i=t}^x \sigma_j Inf_{t-i} + \mu_i$$

Keterangan

- Inf : Inflasi
- W : Wage (Upah Minimum)
- p,r,s,x : time lag
- β_i : Koefisien regresi dari Inflasi pada Inflasi
- δ_j : Koefisien regresi dari Wage pada Inflasi
- ρ_i : Koefisien regresi dari Wage pada Wage
- σ_j : Koefisien regresi dari Inflasi pada Wage

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji kausalitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan timbal balik yang diduga memiliki hubungan saling mempengaruhi satu sama lain antara dua variabel yang diteliti yaitu inflasi (INF) dan upah minimum yang ada di Indonesia dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2024. Dalam pengujian granger causality melibatkan dua tahapan pengujian yakni penentuan uji lag optimal dan langkah selanjutnya adalah melakukan uji kausalitas granger dengan menggunakan lag optimal atau panjang lag yang berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara inflasi dan upah minimum Indonesia dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2024. Data inflasi dan upah minimum diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia

Uji Lag Optimal

Lag optimal merupakan panjang lag yang memberikan pengaruh atau respons yang signifikan (Palupy & Basuki, 2019). Penentuan lag (kelambanan) optimal merupakan tahapan yang sangat penting dalam model VAR/VECM dalam menangkap pengaruh dari setiap variabel terhadap variabel yang lainnya. Penentuan lag optimal digunakan kriteria informasi yang sudah tersedia di dalam proses uji VAR/VECM, seperti Kriteria Likelihood Ratio (LR), Final Prediction Error (FPE), Akaike Information Criterion (AIC), Schwarz Information Criterion(SC), dan Hannan-quin Criterion (HQ).

Tabel 1. Hasil Uji Lag Optimal AIC

Lag	Akaike Information Criterion (AIC)
1	3.65
2	3.63

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Tabel 1 menunjukkan bahwa hasil uji lag optimal pada lag 1 dan lag 2. Dari hasil Uji Lag yang ditunjukkan pada Tabel 1, maka dapat diartikah bahwa panjang lag yang akan digunakan yaitu lag 2 dengan nilai Akaike Information Criterion (AIC) yaitu 3.63. Setelah mengetahui lag optimal yang akan digunakan maka langkah selanjutnya yaitu menguji kausalitas antara inflasi dan pengangguran. Pengujian ini menggunakan Uji Kausalitas Granger (*Granger Causality*).

Uji Kausalitas Granger

Berdasarkan hasil estimasi nilai akaike info criterion maka Lag yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2. Dan berikut adalah hasil uji kausalitas granger

Tabel 2. Hasil Uji Kausalitas Granger

Hipotesis Nol	F-Statistic	Prob
<i>Inflasi Does Not Granger Cause GUMR</i>	3.46253...	0.0501...
<i>GUMR Does Not Granger Cause Inflasi</i>	1.38445...	0.2723...

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 2 di atas menunjukkan hubungan searah antara dua variabel INF dan GUMR (Wage/Upah Minimum) di Indonesia tahun 1997-2024 yang ada pada lag 2. Dalam penentuan signifikansi pada hubungan variabel penelitian tersebut adalah dengan membandingkan

F-hitung dengan F-tabel. Pada dasarnya pengujian dengan granger causality ini digunakan untuk menguji hipotesis nol (null hypothesis) dari masing-masing lag 2. Dalam pengujian hipotesis nol dengan metode ini terdapat kriteria yang menyebutkan bahwa jika F-hitung lebih besar daripada F-tabel maka hipotesis nol ditolak dan menjelaskan bahwa variabel signifikan saling mempengaruhi dan sebaliknya. Sebaliknya apabila Fhitung lebih kecil dari F-tabel maka hipotesis nol diterima dan dapat dijelaskan bahwa variabel tidak signifikan saling mempengaruhi. Penentuan signifikansi juga dapat dilihat dari nilai probabilitasnya, jika nilai probabilitas hitung lebih besar dari $\alpha = 5\%$ maka hipotesis nol ditolak dan menunjukkan adanya hubungan saling mempengaruhi.

Pada tabel 1 pengujian granger pada lag 2 menunjukkan pengujian variabel INFLASI dan GUMR (Pertumbuhan Upah Minimum) dan dengan nilai probabilitas F-statistik lebih besar dari $\alpha = 5\%$ ($0.0501 < 0.05$), hasil ini menyebutkan bahwa H_0 ditolak (Inflasi mempengaruhi pertumbuhan upah minimum) sehingga dapat dijelaskan bahwa besarnya Inflasi mempengaruhi pertumbuhan upah minimum di Indonesia. Selanjutnya, pada pengujian GUMR dan Inflasi memberikan hasil dengan nilai probabilitas F-statistik lebih besar dari $\alpha = 5\%$ ($0.2723 > 0.05$), hasil ini juga menunjukkan bahwa H_0 diterima (GUMR tidak mempengaruhi Inflasi) dengan penjelasan bahwa besarnya pertumbuhan upah minimum di Indonesia tidak berpengaruh pada tingkat inflasi Indonesia. Sesuai hasil pengujian kausalitas pada lag 2 menunjukkan bahwa tidak ada hubungan dua arah antara variabel Inflasi dan pertumbuhan upah minimum (GUMR) di Indonesia.

Pembahasan Dan Diskusi

Inflasi mengacu pada kenaikan umum harga barang dan jasa dalam perekonomian. Ketika harga barang dan jasa naik, daya beli masyarakat menurun. Hal ini berdampak pada pekerja dengan upah tetap, termasuk yang menerima upah minimum, karena meskipun mereka bekerja, pendapatan mereka tidak cukup untuk membeli barang dan jasa yang sama seperti sebelumnya.

Untuk melindungi daya beli pekerja, pemerintah sering kali melakukan penyesuaian terhadap upah minimum seiring dengan meningkatnya inflasi. Tujuannya agar upah minimum tetap dapat mencakup biaya hidup yang meningkat akibat inflasi. Ketika pemerintah menaikkan upah minimum, biaya produksi bagi perusahaan bisa meningkat, terutama untuk bisnis yang menggantungkan tenaga kerja berupah rendah. Perusahaan yang menghadapi biaya lebih tinggi ini mungkin akan menaikkan harga barang dan jasa mereka untuk mempertahankan margin keuntungan, yang berpotensi memperburuk inflasi.

Hasil analisis yang telah diperoleh dari penelitian antara inflasi dan GUMR di Indonesia menunjukkan ketidaksesuaian hasil dengan hipotesis yang telah ditentukan pada awal penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan searah pada Inflasi terhadap GUMR Indonesia pada Lag 2. Perubahan inflasi tidak langsung berdampak pada perubahan upah minimum, dimana adanya perubahan akan secara bertahap mempengaruhi kenaikan upah minimum di Indonesia. Hubungan antara inflasi dan gaji dapat dilihat melalui dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat. Jika inflasi tinggi namun gaji tidak disesuaikan dengan laju inflasi, daya beli masyarakat akan turun. Oleh karena itu, salah satu latar belakang dari hubungan ini adalah kebutuhan untuk menyesuaikan gaji agar dapat

mempertahankan daya beli dalam menghadapi kenaikan harga barang dan jasa.

Ketika permintaan barang dan jasa meningkat sementara pasokan terbatas (misalnya akibat gangguan pasokan atau meningkatnya permintaan global), harga barang dan jasa akan naik. Perusahaan yang menghadapi biaya yang lebih tinggi untuk memproduksi barang dan jasa mungkin akan menaikkan harga jualnya, yang berujung pada inflasi. Kenaikan harga ini dapat menyebabkan tekanan untuk menyesuaikan gaji agar pekerja tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral juga berperan dalam mengatur inflasi. Kebijakan suku bunga rendah yang diterapkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dapat memicu inflasi, sementara kebijakan suku bunga tinggi untuk menahan inflasi bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi. Kedua kebijakan ini memiliki dampak langsung terhadap sektor tenaga kerja dan upah. Kenaikan harga bahan baku atau biaya produksi lainnya, seperti upah pekerja itu sendiri, dapat menyebabkan inflasi. Jika perusahaan menghadapi kenaikan biaya ini, mereka mungkin harus menaikkan harga jual barang dan jasa, yang akan mempengaruhi daya beli masyarakat.

Dalam banyak negara, terutama dengan tradisi perundingan kolektif yang kuat, serikat pekerja dan perusahaan sering melakukan negosiasi untuk menyesuaikan gaji sesuai dengan tingkat inflasi. Penyesuaian ini bertujuan untuk menjaga daya beli pekerja agar tetap stabil meskipun harga barang dan jasa naik. Namun, jika inflasi terlalu tinggi, penyesuaian gaji yang cepat atau besar dapat memicu inflasi upah, yaitu situasi di mana kenaikan gaji justru mendorong kenaikan harga lebih lanjut. Beberapa negara menerapkan kebijakan upah minimum yang diatur oleh pemerintah untuk melindungi pekerja dari dampak inflasi yang tinggi. Selain itu, kebijakan fiskal dan moneter yang diambil oleh pemerintah juga berperan dalam mengendalikan inflasi dan

memastikan keseimbangan antara inflasi dan kenaikan gaji.

KESIMPULAN DAN SARAN

Beberapa penelitian menunjukkan terdapat beberapa siklus inflasi dan kenaikan upah yang berulang. Ketika inflasi mengalami peningkatan, tenaga kerja atau pekerja akan mengajukan tuntutan kenaikan upah untuk menjaga daya beli mereka. Kenaikan upah, pada gilirannya, dapat mendorong kenaikan terhadap harga dari barang dan jasa, yang kemudian mendorong inflasi naik lebih lanjut. Hal ini dapat menciptakan siklus inflasi yang sulit dikendalikan, jika tidak ada kebijakan yang tepat.

Kenaikan harga barang-barang secara umum dan terus menerus atau yang disebut sebagai inflasi mempunyai hubungan atau pengaruh yang searah terhadap pertumbuhan upah minimum sedangkan pertumbuhan upah minimum tidak mempunyai pengaruh terhadap inflasi di Indonesia selama masa periode penelitian yakni dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2024. Sehingga inflasi dan pertumbuhan upah minimum tidak mempunyai hubungan dua arah, yang berarti penyesuaian terhadap pertumbuhan upah minimum didasarkan pada tingkat inflasi namun tidak sebaliknya.

Secara keseluruhan, hubungan antara inflasi dan upah minimum merupakan fenomena yang sangat kompleks, dan keduanya saling mempengaruhi. Penyesuaian upah minimum yang tepat perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara meningkatkan daya beli pekerja dan mengendalikan laju inflasi agar ekonomi tetap stabil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Wulansari, Retno. (2015). Hubungan Kausalitas Upah Minimum Provinsi dan Inflasi di Indonesia Periode 1997-2014.
- Boediono. 1992. Teori Ekonomi Makro. Jogjakarta: Bpfe Ugm.
- Boediono. 1998. Ekonomi Moneter. Yogyakarta: BPFE
- Badan Pusat Statistik Indonesia.2024
- Lube, F., Kalangi, J. B., & Tolosang, K. D. (2021). Analisis Pengaruh Upah Minimum Dan Pdrb Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(3).
- Lipsey, R.G., P.N. Courant, D.D. Purvis, dan P.O. Steiner. 1997. Pengantar Makroekonomi. Edisi ke-10. Wasana, Kirbrandoko dan Budijanto (penerjemah). Binarupa Aksara, Jakarta
- M Nopirin. (2013). Ekonomi Moneter (Edisi Keempat). Yogyakarta: BPFE.
- Palupy, H. E., & Basuki, M. U. (2019). Analisis Pengaruh Investasi Dan Budget Deficit Terhadap Pertumbuhan Di Indonesia. *Diponegoro Journal of Economics*, 1(1), 67-79.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje>
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum
- Rahardja, P., & Manurung, M. (2008). Pengantar ilmu ekonomi (mikroekonomi & makroekonomi). *Language*, 15(490p)
- Rakhmawati, A., & Boedirochminarni, A. (2018). Analisis Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 74-82
- Sudarsono. (1990). Pengantar Teori Ekonomi mikro. LP3S, Jakarta.
- Susanti, Hera, Moh. Ikhsan, dan Widyanti. Indikator-Indikator Makroekonomi ed. 2. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2000.
- Suseno & Siti Astiyah. 2009. Inflasi. Seri Kebanksentralan. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK). Bank Indonesia. Jakarta
- Sukanto, S. (2015). Fenomena Inflasi, Penganguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Pendekatan Kurva Philips Dan Hukum Okun. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(2), 96-106.
- Sukirno, S. (2013). Makroekonomi Teori Pengantar (Edisi Ketiga). Jakarta: Rajawali Pers.
- Wihastuti, L., & Rahmatullah, H. (2018). Upah minimum provinsi (UMP) dan penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. *Jurnal Gama Societa*, 1(1), 96-102.
- Widiyanto Feri & Yuni Prihadi Utomo (2023)